



## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Eko Adi Saputro<sup>✉</sup>, Amir Mahmud

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juni 2015  
Disetujui Juli 2015  
Dipublikasikan Agustus 2015

*Keywords:*  
*Capital Expenditure,;*  
*Complexity; Internal Control*  
*Weakness, and Size*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah yang berjumlah 141 data. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh 104 data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS V.21. Hasil penelitian diperoleh melalui pengujian parsial yang menunjukkan bahwa Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Pengujian simultan menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, agar diperoleh informasi yang lengkap mengenai kelemahan pengendalian intern.

### Abstract

*The purposes of this research were to examine the influences of Size, PAD, Complexity, and Capital Expenditure of the local government internal control weaknesses. The populations of this research are annual report and regency's examine reports in Central Indonesia area that amounted to 141 data. The samples in this research using purposive sampling method obtained 104 data. The hypotheses were tested by using multiple linier regression with SPSS V.21. The results of this research are Size, PAD, Complexity, and Capital Expenditure partially don't have significant influences toward Internal Control Weakness. The simultanly there is no significant influence between independent variables to dependent variable. The next researches are expected to use primary data, in order to obtain complete information about internal control weaknesses.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [adisaputroeko@gmail.com](mailto:adisaputroeko@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Adanya penerapan sistem desentralisasi pada sektor pemerintahan yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dikeluarkannya regulasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih populer disebut dengan otonomi daerah menjadikan kebutuhan akan pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting. Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri, serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Fama dan Jensen 1983).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK pada semester 2 tahun 2013, telah memeriksa LKPD tahun 2012 yang terdiri atas 108 LKPD kabupaten/kota se-Indonesia telah menemukan 1.251 kasus kelemahan pengendalian intern. Kasus kelemahan pengendalian intern tersebut terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 520 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja sebanyak 499 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 232 kasus. Banyaknya kasus pengendalian intern yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia ini diduga terjadi karena belum maksimalnya penerapan pengendalian intern pada sektor pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor determinan pengendalian intern banyak dilakukan di sektor swasta dan organisasi nirlaba. Penelitian tersebut yaitu Doyle *et al* (2007), dan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010). Selain itu di Indonesia ada beberapa peneliti yang meneliti faktor penentu kelemahan pengendalian intern pada pemerintah daerah. Penelitian tersebut adalah Kristanto (2009), Martani dan Zaelani (2011), Puspitasari (2013), dan Hartono (2014). Penelitian yang dilakukan Doyle *et al* (2007) menemukan pengaruh negatif ukuran dan pengaruh positif kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan oleh Petrovits (2010) menemukan pengaruh negatif ukuran dan pengaruh positif pendapatan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sementara itu penelitian sejenis yang dilakukan di Indonesia oleh Kristanto (2009) menemukan pengaruh positif PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan pengaruh negatif ukuran dan pengaruh positif PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan Puspitasari (2013) telah menemukan pengaruh positif PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) menemukan pengaruh negatif ukuran dan pengaruh positif kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelumnya diluar negeri oleh Doyle *et al* (2007) dan Petrovits (2010) terletak pada populasi penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan populasi organisasi nirlaba, sedangkan pada

penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah ukuran. Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Ukuran dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian dari Kristanto (2009) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

**H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari sumber lain yang sah. Besar kecilnya jumlah PAD dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi juga akan meningkatkan risiko kecurangan, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petrovits (2010) yang menyatakan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian internal dalam suatu organisasi meningkat. Martani dan Zaelani (2011) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

**H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.**

Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu mengimplementasikan pengendalian intern. Semakin kompleks suatu daerah akan semakin sulit mengimplementasikan tujuannya dalam rangka melakukan pengendalian intern. Penelitian mengenai hubungan kompleksitas dengan kelemahan pengendalian intern oleh Doyle *et al* (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan kompleksitas transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern yang tinggi. Hartono (2014) dan Puspitasari (2013) menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

**H3: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.**

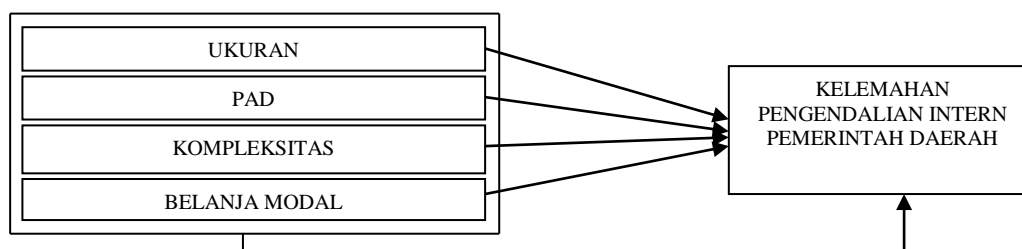
Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern yang dilakukan Mauro (1998) dalam Kristanto (2009) menemukan bahwa korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, *mark up* dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi.

**H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.**

Berdasarkan penjelasan masing-masing variabel independen pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan H5 sebagai berikut:

**H5: Ukuran pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.**

Secara diagram, hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh dari website BPK ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Data tentang PAD dan belanja modal diperoleh melalui website DJPK

([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Sedangkan data jumlah kecamatan dan penduduk diperoleh melalui website BPS masing-masing provinsi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS V. 21. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di wilayah Indonesia tengah yang berjumlah 141 kabupaten/kota. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 yang diperoleh menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah Populasi
1	Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah yang mempublikasikan Laporan Keuangannya pada Tahun Anggaran 2012 dan telah diaudit oleh BPK	141
2	Menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang diterbitkan oleh BPK	141
3	Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur, yaitu jumlah penduduk, PAD, jumlah kecamatan, dan belanja modal	141
	Jumlah Sampel	104

## DEFINISI DAN PEMBATASAN VARIABEL

### Variabel Dependen

#### Kelemahan Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi *board of directors*, manajemen, dan pegawai lainnya yang

dirancang untuk memberikan keyakinan yang layak dapat dicapainya tujuan-tujuan organisasi (Standar Profesi Akuntan Publik, SA Seksi 319). Kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa jumlah temuan kasus

penyimpangan atau pelanggaran terhadap SPI dalam Pemerintah Daerah.

**Variabel Independen**

**Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah dapat menggambarkan besar kecilnya skala pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah penduduk yang dimiliki daerah tersebut.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. PAD dapat diukur dari besarnya nilai nominal realisasi penerimaan PAD yang diperoleh suatu kabupaten/kota.

**Kompleksitas Daerah**

Kompleksitas suatu daerah adalah sebuah tingkatan deferensiasi yang ada pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan. Kompleksitas suatu daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah kecamatan.

**Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdapat masalah asumsi klasik seperti di atas atau tidak. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini tergambar dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	104	2	24	8,96	4,055
Ukuran	104	53657	1123488	264512,83	168858,825
PAD	104	4844	147229	39842,94	30003,021
Kompleksitas	104	4	33	13,26	6,393
BModal	104	58249	267466	133315,12	45225,722

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 104 unit, dapat diperoleh hasil untuk nilai kelemahan SPI tertinggi sebesar 24 kasus, Ukuran tertinggi yang diproksikan jumlah penduduk sebesar 1.123.488 jiwa, PAD tertinggi sebesar Rp 147,23 Milyar, Kompleksitas tertinggi yang diproksikan dengan jumlah kecamatan sebesar 33, dan Belanja Modal tertinggi sebesar Rp 267,47 Milyar. Nilai kelemahan SPI terendah sebesar 2 kasus, ukuran

terendah sebesar 53.657 jiwa, PAD terendah sebesar Rp 4,8 Milyar, kompleksitas terendah sebesar 4 kecamatan, dan belanja modal terendah sebesar Rp 58,25 Milyar.

Nilai rata-rata dari variabel kelemahan SPI sebesar 9 kasus dengan nilai standar deviasi 4,05. Nilai rata-rata dari variabel ukuran sebesar 264.513 jiwa dengan nilai standar deviasi 168.859 jiwa. Nilai rata-rata dari variabel PAD sebesar Rp 39,84 Milyar dengan nilai standar

deviasi Rp 30 Milyar. Nilai rata-rata dari variabel kompleksitas sebesar 13 kecamatan dengan nilai standar deviasi 6 kecamatan. Nilai rata-rata dari variabel belanja modal sebesar Rp 133,32 Milyar dengan nilai standar deviasi Rp 45,23 Milyar.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikansi semua variabel di atas 0,05 (SPI (0,238), Ukuran (0,544), PAD (0,147), Kompleksitas (0,099), dan Belanja Modal (0,203)). Jadi dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Ukuran (2,301), PAD (2,062), Kompleksitas (1,543), dan Belanja Modal (1,208)). Jadi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Uji heterokedastisitas menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, dimana tingkat signifikansi untuk semua variabel independen diatas 0,05 atau 5% (Ukuran (0,248), PAD (0,545), Kompleksitas (0,270), dan Belanja Modal (0,241)). Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan  $SPI = 3,305 + 0,001 X_1 - 0,001 X_2 - 0,103 X_3 - 0,006 X_4 + e$ . Pada pengujian hipotesis dilakukan uji t dan uji F.

Tabel 3. Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	3,305	,344	9,611	,000
1	Ukuran	,001	,001	,174	,248
	PAD	-,001	,001	-,086	,545
	Kompleksitas	-,103	,093	-,136	,270
	BModal	-1,868E-006	,000	-,128	,241

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil pada tabel 3 nilai t hitung variabel ukuran lebih besar dari t tabel, sehingga **H1 ditolak**. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan ukuran (jumlah penduduk) tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2013). Suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan pengendalian intern dengan harapan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Perusahaan atau organisasi yang mempunyai ukuran besar dilihat dari segi sumber daya dan finansial cenderung mampu untuk melakukan pengendalian intern dengan baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 3 nilai t hitung dari variabel PAD lebih besar dari t tabel, sehingga **H2 ditolak**. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristanto (2009), Hasmawati dan Raharja (2012), Puspitasari (2013), dan Hartono (2014) yang mengatakan tidak ada pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Kristanto (2009) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dikarenakan sejak semakin maraknya pengungkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran

Pendapatan dan APBD, membuat PAD sebagai salah satu obyek korupsi mendapat pengawasan khusus dalam peruntukannya dengan tujuan agar pemerintah daerah efektif melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat banyak.

Berdasarkan hasil pada tabel 3 nilai t hitung variabel kompleksitas lebih besar dari t tabel, sehingga **H3 ditolak**. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan kompleksitas (jumlah kecamatan) tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) yang menggunakan proksi jumlah kecamatan dan tidak menemukan pengaruh jumlah kecamatan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Menurut Martani dan Zaelani (2011), pemerintah daerah yang memiliki jumlah kecamatan besar belum tentu lebih kompleks, hal ini disebabkan setiap kecamatan relatif tidak jauh berbeda, melaksanakan fungsi yang sama, dan

lingkungan kerja yang sederhana. Jadi meskipun jumlah kecamatan banyak tidak menjadikan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih sulit melakukan pengaturan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil pada tabel 3 nilai t hitung variabel belanja modal lebih besar dari t tabel, sehingga **H4 ditolak**. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Menurut Kristanto (2009), belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah kabupaten/kota dikarenakan tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian intern.

Tabel 4. Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,565	4	,391	,895	,470 <sup>b</sup>
1 Residual	43,277	99	,437		
Total	44,842	103			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 4 menunjukkan besarnya nilai F hitung adalah 0,895 dinyatakan dengan tanda positif maka arah hubungannya adalah positif. Nilai secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada  $\alpha = 0,05$ , yaitu sebesar 0,47 artinya nilai signifikansi  $0,47 > 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen artinya Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian intern, sehingga **H5 ditolak**. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa jika terjadi kenaikan atau penurunan jumlah penduduk, PAD, jumlah kecamatan, dan

belanja modal tidak akan berpengaruh terhadap jumlah kasus kelemahan pengendalian intern.

**Koefisien Determinasi**

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	,187 <sup>a</sup>	,035	-,004	,66117

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 5 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* -0,004 yang berarti 0,4% variabel Kelemahan Pengendalian Intern dapat dijelaskan oleh variabel ukuran, PAD,

kompleksitas, dan belanja modal. Sedangkan sisanya 99,6% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model regresi.

## SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan variabel ukuran, PAD, kompleksitas, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Secara parsial atau sendiri-sendiri menunjukkan variabel ukuran, PAD, kompleksitas, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah: 1) Pemerintah daerah diharapkan memperbaiki prosedur pengendalian yang ada di daerahnya dan meningkatkan pemantauan pengendalian untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan, dikarenakan kedua komponen ini menjadi faktor penyebab terbesar kasus kecurangan akibat kelemahan pengendalian intern yang ada di daerah, 2) Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan jumlah sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya, 3) Penelitian selanjutnya apabila menggunakan PAD dan belanja modal, diharapkan menggunakan banyaknya pos-pos penyusun PAD maupun belanja modal sebagai pengukurnya agar diperoleh data yang lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, 4) Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah, seperti jumlah aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pertumbuhan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat (DAU), dan 5) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, seperti kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi pemerintah lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Penulisan artikel dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih untuk Ibu dan Bapak serta keluarga saya yang selalu memberikan doa, dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNNES yang selalu memberikan arahan selama menempuh ilmu dan seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi B 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2013*. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) diakses pada 10 November 2014.
- Doyle, J., Ge, Weili, Mc Vay, S. 2007. Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of accounting and Economics*, 44, 193-223.
- Fama dan Jensen. (1983). The Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, pp.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Hasmawati dan Raharja. 2012. Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (studi Kasus pada koperasi di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1, No. 1.
- Hartono, Rudi. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Volume 9, No. 1
- Martani dan Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi



- Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences on Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*
- Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. *Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*